

## Matriks Perbandingan

### PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Peraturan Bupati Tegal Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran	Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,	BUPATI TEGAL,
Menimbang:	Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan terkait pergeseran anggaran pada Bab VI Huruf D nomor 1 huruf m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk melaksanakan penganggaran dan penatausahaan belanja yang melampaui tahun anggaran, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;
Mengingat:	Mengingat:
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</li> </ol>

<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 148);</p>	<p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 25);</p>
--	--

<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 25) diubah sebagai berikut:</p>
	<p>1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 19 dan angka 20 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.</li> <li>2. Bupati adalah Bupati Tegal.</li> <li>3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal.</li> <li>4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan organisasi perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal.</li> <li>5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.</li> <li>6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</li> <li>7. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.</li> <li>2. Bupati adalah Bupati Tegal.</li> <li>3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal.</li> <li>4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan organisasi perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal.</li> <li>5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.</li> <li>6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</li> <li>7. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.</li> </ol>

<p>8. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.</p> <p>9. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.</p> <p>10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan APBD.</p> <p>11. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.</p> <p>12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.</p> <p>13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.</p> <p>14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.</p>	<p>8. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.</p> <p>9. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.</p> <p>10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan APBD.</p> <p>11. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.</p> <p>12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.</p> <p>13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.</p> <p>14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada</p>
--	---

<p>15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.</p> <p>16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.</p> <p>17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.</p> <p>18. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan LRA adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan dan pagu anggarannya yang telah ditetapkan pada awal tahun.</p>	<p>Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.</p> <p>16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.</p> <p>17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.</p> <p>18. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan LRA adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan dan pagu anggarannya yang telah ditetapkan pada awal tahun.</p> <p>19. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat dengan SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas pelaksanaan APBD.</p> <p>20. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Peraturan Bupati ini disusun untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pergeseran anggaran.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan agar pelaksanaan pergeseran anggaran dapat berjalan dengan tertib dan akuntabel.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:</p> <p>a. jerus pergeseran anggaran;</p>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>b. kriteria pergeseran anggaran;</li> <li>c. ketentuan pergeseran anggaran; dan</li> <li>d. mekanisme pergeseran anggaran.</li> </ul>	
<p><b>BAB II</b> <b>JENIS PERGESERAN ANGGARAN</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Pergeseran Anggaran terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan</li> <li>b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.</li> </ul>	
<p><b>BAB III</b> <b>KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), mempunyai kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pergeseran antar organisasi;</li> <li>b. pergeseran antar unit organisasi;</li> <li>c. pergeseran antar program;</li> <li>d. pergeseran antar kegiatan;</li> <li>e. pergeseran antar sub kegiatan;</li> <li>f. pergeseran antar kelompok; dan</li> <li>g. pergeseran antar jenis.</li> </ul> <p>(2) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), mempunyai kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;</li> <li>b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;</li> <li>c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan</li> <li>d. pergeseran atau perubahan atas uraian dari sub rincian objek.</li> </ul>	
<p><b>BAB IV</b></p>	

KETENTUAN PERGESERAN ANGGARAN	
Pasal 7	
<p>(1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.</p> <p>(2) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat dilakukan selama program kegiatan dan atau sub kegiatan tercantum dalam Perubahan KUA (Kebijakan Umum APBD) dan Perubahan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/ atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian/Lembaga teknis terkait, atau Pemerintah Provinsi.</p> <p>(3) Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat dilakukan sebelum perubahan APBD dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.</p> <p>(4) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan sepanjang tidak mengubah target kinerja program dan/ atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian/Lembaga teknis terkait, atau Pemerintah Provinsi.</p> <p>(5) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD terlebih dahulu.</p> <p>(6) Pergeseran/perubahan anggaran yang mendahului perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) akan ditampung</p>	

<p>dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan apabila pada tahun berjalan tidak ada Perubahan APBD maka akan ditampung dalam laporan realisasi anggaran.</p> <p>(7) Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang dilakukan setelah perubahan APBD akan ditampung dalam laporan realisasi anggaran.</p> <p>(8) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, nominal pagu anggarannya harus sama sebelum pergeseran dengan setelah pergeseran anggaran.</p> <p>(9) Pergeseran anggaran dilakukan dengan Menyusun perubahan DPA-SKPD.</p> <p>(10) Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.</p>	
	<p>2. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 8 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4a) dan ayat (4b) sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Pergeseran anggaran pada kondisi tertentu yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (7) dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kondisi mendesak;</li> <li>b. kondisi darurat; dan/ atau</li> <li>c. perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.</li> </ol> <p>(2) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak tersedia dalam tahun anggaran berjalan;</li> <li>b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Pergeseran anggaran pada kondisi tertentu yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (7) dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kondisi mendesak;</li> <li>b. kondisi darurat; dan/atau</li> <li>c. perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.</li> </ol> <p>(2) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak tersedia dalam tahun anggaran berjalan;</li> <li>b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;</li> </ol>

<p>c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan / atau</p> <p>d. pengeluaran lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.</p> <p>(3) Belanja daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan dan belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.</p> <p>(4) Belanja daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain Pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:</p> <p>a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial atau kejadian luar biasa;</p> <p>b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau</p> <p>c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.</p> <p>(6) Perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:</p>	<p>c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau</p> <p>d. pengeluaran lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.</p> <p>(3) Belanja Daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan dan belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.</p> <p>(4) Belanja Daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain Pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4a) Pelaksanaan kewajiban kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk untuk pelaksanaan dan penatausahaan belanja yang melampaui tahun anggaran.</p> <p>(4b) Pelaksanaan dan penatausahaan belanja yang melampaui tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4a), meliputi:</p> <p>a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun berkenaan;</p> <p>b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;</p>
--	---

<p>a. pergeseran anggaran yang disebabkan adanya amanat dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya;</p> <p>b. pergeseran anggaran yang disebabkan adanya perubahan petunjuk teknis terhadap kegiatan yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat, dana transfer Pemerintah Provinsi atau transfer Pemerintah Daerah lainnya; dan/atau</p> <p>c. pergeseran anggaran yang disebabkan dengan adanya penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD pada kondisi tertentu dapat dilakukan dari belanja tidak terduga dan apabila belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam tahun anggaran berjalan, pemanfaatan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun berjalan, dan atau penambahan target pendapatan.</p>	<p>c. keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (<i>force majeure</i>) sesuai peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>d. kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.</p> <p>(5) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:</p> <p>a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial atau kejadian luar biasa;</p> <p>b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau</p> <p>c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.</p> <p>(6) Perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:</p> <p>a. pergeseran anggaran yang disebabkan adanya amanat dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya;</p> <p>b. pergeseran anggaran yang disebabkan adanya perubahan petunjuk teknis terhadap kegiatan yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat, dana transfer Pemerintah Provinsi atau transfer Pemerintah Daerah lainnya; dan/atau</p> <p>c. pergeseran anggaran yang disebabkan dengan adanya penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD pada kondisi tertentu dapat dilakukan dari belanja tidak terduga dan apabila belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam tahun anggaran berjalan, pemanfaatan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun berjalan, dan atau penambahan target pendapatan.</p>
--	---

<p style="text-align: center;"><b>BAB V</b> <b>MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Pergeseran an tar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.</p> <p>(2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA kepada Sekretaris Daerah yang ditembuskan ke PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. surat permohonan pergeseran anggaran antar objek dalam jenis yang sama dengan kronologis keadaan/alasan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;</li> <li>b. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan Perubahan DPA SKPD;</li> <li>c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala SKPD selaku PA; dan</li> <li>d. format surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.</p> <p>(2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. surat permohonan pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama dengan kronologis keadaan/ alasan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;</li> </ol>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>b. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan Perubahan DPA SKPD;</li> <li>c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala SKPD selaku PA; dan</li> <li>d. format surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.</li> </ul>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.</li> <li>(2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. surat permohonan pergeseran anggaran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dengan kronologis keadaan/ alasan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;</li> <li>b. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan Perubahan DPA SKPD;</li> <li>c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala SKPD selaku PA.</li> <li>d. format surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.</li> </ul> </li> </ul>	
	<p>3. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (2a), ayat (2b) dan ayat (2c) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Pergeseran anggaran pada kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (7) dapat dilakukan atas persetujuan TAPD.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Pergeseran anggaran pada kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (7) dapat dilakukan atas persetujuan TAPD.</li> </ul>

<p>(2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dengan tembusan kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. surat permohonan pergeseran anggaran dengan kondisi tertentu dengan kronologis keadaan/alasan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;</li> <li>b. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan Perubahan DPA SKPD;</li> <li>c. peraturan perundang-undangan dan/atau dokumen pendukung yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran pada kondisi tertentu; dan</li> <li>d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala SKPD selaku PA.</li> </ol> <p>(3) Format surat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.</p>	<p>(2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dengan tembusan kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. surat permohonan pergeseran anggaran dengan kondisi tertentu dengan kronologis keadaan/alasan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;</li> <li>b. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan Perubahan DPA SKPD;</li> <li>c. peraturan perundang-undangan dan/atau dokumen pendukung yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran pada kondisi tertentu; dan</li> <li>d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala SKPD selaku PA.</li> </ol> <p>(2a) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4b) huruf a dan huruf b diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dengan tembusan kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. surat permohonan pergeseran anggaran dengan kondisi tertentu dengan kronologis keadaan/alasan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;</li> <li>b. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan Perubahan DPA SKPD;</li> <li>c. hasil reuviu APIP untuk pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran; dan</li> <li>d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala SKPD selaku PA.</li> </ol> <p>(2b) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4b) huruf c diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA kepada Sekretaris</p>
--	--

	<p>Daerah selaku Ketua TAPD dengan tembusan kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. surat permohonan pergeseran anggaran dengan kondisi tertentu dengan kronologis keadaan/alasan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;</li> <li>b. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan Perubahan DPA SKPD;</li> <li>c. surat penetapan keadaan kahar (force majeure) dari Bupati untuk pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa; dan</li> <li>d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala SKPD selaku PA.</li> </ol> <p>(2c) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4b) huruf d diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dengan tembusan kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. surat permohonan pergeseran anggaran dengan kondisi tertentu dengan kronologis keadaan/alasan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;</li> <li>b. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan Perubahan DPA SKPD;</li> <li>c. hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap; dan</li> <li>d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala SKPD selaku PA.</li> </ol> <p>(3) Format surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.</p>
	<p>4. Ketentuan Pasal 14 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:</p>
Pasal 14	Pasal 14

<p>(1) Dalam hal usulan pergeseran pada 1 (satu) kegiatan dari SKPD memenuhi lebih dari 1 (satu) kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka usulan pergeseran mengikuti mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.</p> <p>(2) PPKD menerbitkan perubahan DPA SKPD setelah surat pergeseran anggaran disetujui.</p> <p>(3) Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh SKPD.</p>	<p>(1) Dalam hal usulan pergeseran pada 1 (satu) kegiatan dari SKPD memenuhi lebih dari 1 (satu) kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka usulan pergeseran mengikuti mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.</p> <p>(2) PPKD menerbitkan perubahan DPA SKPD setelah surat pergeseran anggaran disetujui.</p> <p>(3) Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh SKPD.</p> <p>(4) Pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.</p>
<p><b>BAB VI</b> <b>KETENTUAN PENUTUP</b></p>	
<p>Pasal 15</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	
	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.</p>	<p>Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.</p>
<p>Ditetapkan di Slawi pada tanggal 14 Maret 2022 BUPATI TEGAL, ttd UMI AZIZAH</p>	<p>Ditetapkan di Slawi pada tanggal 15 Mei 2024 Pj. BUPATI TEGAL, ttd AGUSTYARSYAH</p>
<p>Diundangkan di Slawi pada tanggal 14 Maret 2022</p>	<p>Diundangkan di Slawi pada tanggal 15 Mei 2024</p>
<p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, ttd WIDODO JOKO MULYONO</p>	<p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, ttd AMIR MAKHMUD</p>
<p>BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL</p>	<p>BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL</p>

TAHUN 2022 NOMOR 25	TAHUN 2024 NOMOR 12
---------------------	---------------------